



Rp160 M DAU untuk Pendidikan



ANDREAS/PONTIANAK POST

PEMBINA UPACARA: Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat saat memimpin upacara HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia yang berlangsung di GOR Uncak Kapuas, Jumat (25/11).



PUTUSSIBAU - Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kapuas Hulu untuk dana pendidikan mencapai Rp160 miliar pada 2023. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat saat memimpin upacara HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-77 dan Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2022 di GOR Uncak Kapuas, Jumat (25/11) pagi.

Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu memberikan perhatian serius dalam mendukung dunia pendidikan di daerah. "Terpent-

ing sekarang Dana Alokasi Umum (DAU) sekarang di luar DAK. Untuk Kapuas Hulu dana pendidikan ini sendiri ada Rp160 miliar tahun 2023. Maka dari itu guru jangan mengeluh, karena Pemerintah selalu memberikan dukungan kepada guru," pesan Wabup.

Wabup menyampaikan bahwa di Hari Guru ini, guru harus mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Untuk itu Wabup berharap, sekarang guru itu harus benar-benar mengajar untuk mencetak para murid, agar selalu berinovasi, berkreasi dan berkolaborasi dengan

siapa pun.

"Guru ini sangat penting, saya saja jadi Wakil Bupati tak terlepas dari peran guru yang telah mendidik di sekolah," tegas Wabup.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengharapkan agar guru tidak hanya mengajar secara akademik, melainkan akhlak juga, karena sekarang moral anak sekarang lagi menurun.

"Sekarang anak-anak kita mentalnya masih jauh, belum apa-apa sudah menyerah. Inilah tantangan berat dari guru agar bisa terus mendorong dan memotivasi anak untuk lebih giat lagi dalam

menempuh pendidikan," pintanya.

Sementara itu Sunarko, ketua PGRI Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Kapuas Hulu masih kekurangan guru. Namun ia mengakui dengan dibukanya penerima guru melalui PPPK pada 2021 dan 2022 ini cukup membantu kekurangan guru yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Namun masih dirasa kurang karena tahun 2022 ini hanya 110 guru yang diterima, sementara kebutuhan guru honorer yang ada saat ini 1.900 yang mengajar di sekolah swasta," ujarnya.

Sunarko berharap, dengan adanya penerimaan guru PPPK pada 2023 agar jumlahnya diperbesar. Sehingga guru honorer yang ada di sekolah negeri maupun swasta ini diharapkan dia, bisa meningkatkan kesejahteraannya.

"Sekarang tantangan guru ini adalah perubahan kurikulum yang sangat masif sementara tidak diimbangi dengan pelatihan yang dilakukan Pemerintah. Jadi guru mengakses sendiri, belajar sendiri. Untuk pembimbingan sendiri tidak ada sehingga guru jadi sulit menerapkan kurikulum itu kepada murid," tandasnya. **(dRe)**